

**CASECADING BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

<b>SASARAN</b>	: 1. Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah 2. Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan 3. Peningkatan Akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisiensi untuk tugas pemerintahan dan pembangunan 4. Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan 5. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah 6. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah 7. Peningkatan sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan berkinerja baik 8. Penataan sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis sistem impormasi manajemen daerah secara elektronik	<b>TARGET</b>		
<b>INDIKATOR</b>	: 1. Persentase penyediaan pelayanan admidtrasi perkantoran 2. Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur yang disediakan 3. Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur yang disediakan 4. Persentase peningkatan jabatan fungsional tertentu 5. Nilai SAKIP 6. Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD 7. tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak daerah	94 % 84 % 84 % 36 % Nilai C 1 Kali 91%		
<b>SEKRETARIS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RERTIBUSI DAERAH KABUPATEN MERANGIN</b>		<b>TARGET</b>		
Sasaran :	1. Peningkatan aparatur badan pengelola pajak dan retribusi daerah yang terampil responsif dalam pendaptan daerah			
Indikator :	1. Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran 8. persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu 9. persentase kapasitas sumber daya aparatur yang handal	92% 92% 92%		
<b>Kasubbag Umum dan Kepegawaian</b>	<b>Target</b>	<b>Kasubag Program dan keuangan</b>	<b>Target</b>	
Sasaran :		Sasaran :		
1. Penataan administrasi dan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah	94 %	1. Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah	94 %	
2. Peningkatan Akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisiensi untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	84 %	2. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	C	
3. Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisiensi untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	84 %	Peningkatan Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	80%	
Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk	36%	Penataan sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis sistem impormasi	91%	

melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan		manajemen keuangan daerah secara elektronik			
Indikator :		Indikator :			
1. Jumlah Dokumen Surat Yang terselesaikan	2200 Surat	1. Tersedianya jasa Admidtrasi keuangan	12 bulan		
2. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	2. Jumlah laporan kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen		
3. Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Terlunasi Pajaknya	21 Unit	3. Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	1 Dokumen		
4. Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	4. Jumlah laporan tahunan yang disusun	1 dokumen		
5. Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	5. Tersedianya dokumen rencana kerja SKPD selama 5 tahun	1 dokumen		
6. Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	1 Jenis	6. Jumlah dokumen rencana kerja tahunan yang disusun	1 Dokumen		
7. Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik yang diadakan	10 Jenis	7. Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran yang disusun	1 Dokumen		
8. Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di adakan	35 Media Masa	8. jumlah sistem impormasi dan database manajemen PAD yang di pelihara	1 Sistem Impormasi		
9. Tersedianya makan dan/minuman/pegawai/pasien/Tamu	12 bulan				
10. Tersedianya tenaga admitrasi dan teknisi perkantoran	71 orang				
11. Frekwensi koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah yang dilaksanakan	175 kali				
12. Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	5 Unit				
13. Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	9 Unit				
14. Jumlah mubeleur yang diadakan	12 Unit				
15. Jumlah perangkat komputer yang di sediakan	5 Unit				
16. Jumlah kendaraan dinas operasional/yang di pelihara	21 Unit				
17. Jumlah peralatan gedung yang di pelihara	103 Unit				
18. Jumlah pakaian dinas dan atribut yang disediakan	130 stel				
19. Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Teknis Fungsional	80 Orang				

<b>KABID PENDAFTARAN,PENDATAAN DAN PENETAPAN</b>					<b>TARGET</b>
Sasaran : 1. Meningkatnya peyelenggaraan urusan pendataan,penetapan,dan pelaporan pendapatan daerah					
Indikator : 1. Persentase jumlah pendataan objek pajak secara benar					100%
<b>Kasi Pengelohan Data</b>	<b>Target</b>	<b>Kasi Penetapan</b>	<b>Target</b>	<b>Kasi Pendataan dan pendaftaran</b>	<b>Target</b>
Sasaran : 1. Penataan sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis Sistem Informasi Manajemen keuangan Daerah secara elektronik	91 %	Sasaran : 1. Penataan system pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis sistem impormasi manajemen keuangan daerah secara elektronik	91 %	Sasaran : 2. Penataan system pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis sistem impormasi manajemen keuangan daerah secara elektronik	91 %
Indikator : 1. Jumlah SPPT dan DHKP PBB yang diterbitkan	5000 wajib pajak.	Indikator : 1. Penertibatan SPKPRD/SKPRD dan penyampaian dan pelayanan terhadap WP/WR	1 DOKUMEN	Indikator : 1. Database objek pajak dan subjek pajak PBB	1 Dokumen
2. Jumlah DHKP dan SPT PBB yang didistribusikan	24 wajib pajak	2. Jumlah wajib pajak dan retribusi daerah dilayani	5000 Wp/ Wr	2. Pelaksanaan penyuluhan sosialisasi pajak dan retribusi daerah	12 kali
3. Data wajib pajak dan retribusi daerah	1 Dokumen			3. Update Database Zona nilai tanah nilai Indikasi Rata-rata	1 Database

<b>KABID PENGEMBANGAN,REGULASI DAN PENGEMBANGAN</b>					<b>TARGET</b>
<p>Sasaran : 1. Melaksanakan upaya-upaya terhadap pengembangan pajak dan retribusi daerah</p> <p>2. Melaksanakan penertiban dan penyempurnaan peraturan perundang umdangan mengenai pajak dan retribusi daerah</p> <p>Indikator : 1. Persentase peningkatan objek pajak yang telah dilaksanakan secara benar</p> <p>2. persentase meningkatnya pengetahuan masyarakat akan prosedur dan mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah</p>					<p>100 %</p> <p>100 %</p>
<b>Kasi Pengembangan</b>	<b>Target</b>	<b>Kasi Regulasi</b>	<b>Target</b>	<b>Kasi Pelaporan</b>	<b>Target</b>
<p>Sasaran :</p> <p>1. Penataan sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis Sistem Informasi Manajemen keuangan Daerah secara elektronik</p> <p>Indikator :</p> <p>1. Penyelenggaraan pameran publikasi pembangunan</p> <p>2. Perekwensi penertiban wajib pajak dan wajib retribusi</p>	<p>91 %</p> <p>2 kali</p> <p>4 Kali</p>	<p>Sasaran :</p> <p>1. Penataan sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis Sistem Informasi Manajemen keuangan Daerah secara elektronik</p> <p>Indikator :</p> <p>1. Prekwensi sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi daerah</p>	<p>91 %</p> <p>4 kali</p>	<p>Sasaran :</p> <p>1. Penataan sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis Sistem Informasi Manajemen keuangan Daerah secara elektronik</p> <p>Indikator :</p> <p>1. Laporan rekonsiliasi dana bagi hasil dan retribusi daerah</p> <p>2. Laporan rekapitulasi PAD kabupaten merangin</p>	<p>91 %</p> <p>1 Dokumen</p> <p>1 Dokumen</p>

<b>KABID PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN</b>					<b>TARGET</b>
Sasaran : 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah					
Indikator : 1. Persentase penagihan pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan tepat waktu					100%
<b>Kasi keberatan dan banding</b>	<b>Target</b>	<b>Kasi Penagihan</b>	<b>Target</b>	<b>Kasi Penelitian dan penelian</b>	<b>Target</b>
Sasaran : 1. Penataan sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis Sistem Informasi Manajemen keuangan Daerah secara elektronik	91 %	Sasaran : 1. Penataan sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis Sistem Informasi Manajemen keuangan Daerah secara elektronik	91 %	Sasaran : 1. Penataan sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis Sistem Informasi Manajemen keuangan Daerah secara elektronik	91 %
Indikator : 1. Terlaksananya Programm Monotoring dan evaluasi PBB dan BPHTB 2. Tersedianya Data Rincian Saldo Piutang PBB	4 Kali  1 Dokumen	Indikator : 1. Pelaksana Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah 2. Jumlah SPT Pajak dan Retribusi Daerah yang di Data	1000 kali  2000 WP/WR	Indikator : 1. Prekwensi penataan objek retribusi pasar 2. Pelaksanaan Monitoring dan rapat evaluasi	1 Data base  4 kali

**KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN**

  
**Drs. AMIR ACHMAD**  
**PEMBINA UTAMA MUDA IV.c**  
**NIP. 19670413 199603 1 003**